

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1. Rancangan Penelitian**

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan pada DPKAD kabupaten Lumajang jika dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan dan rasio derajat otonomi fiskal.

#### **1.1 Obyek Penelitian**

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan, Daerah (BPKD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang berlokasi di Jalan Alun-alun Utara Nomor 7, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

#### **1.2. Sumber dan Jenis Data**

##### **3.3.1. Jenis data**

Seperti yang telah dikemukakan , data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Bupati Kabupaten Lumajang untuk tahun 2012-2016 serta data pendukung lainnya yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan cara Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan ataupun *softcopy dan hardcopy* atas data-data yang diperlukan dibutuhkan yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

### 3.5. Variabel Penelitian

#### 3.5.1 Definisi Operasional Variabel

- Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya menurut Halim, (2002).
- Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

- Menurut Halim (2008:241) Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah itu sendiri untuk membiayai pengeluaran pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

#### 1.6 Teknik Analisis Data

Tahap-tahap teknik menganalisis data dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan indikator kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah. Untuk menganalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan indikator kemampuan keuangan yaitu rasio derajat otonomi fiskal.

#### 3.6.1 Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana darurat dan dana pinjaman.

Rumus rasio kemandirian keuangan daerah yaitu:



Nilai	Kriteria
0-25	Rendah sekali
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996.

Keterangan:

RKKD : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

TPPAD : Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

TBPP : Total Bantuan Pusat dan Pinjaman

2. Rasio efektivitas keuangan daerah (REKD) ditunjukkan dengan realisasi pendapatan asli daerah apakah sudah memenuhi target yang di rencanakan daerah.

Rumus Rasio efektivitas keuangan daerah:

Nilai	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	cukup efektif
60% - 80%	kurang efektif
<60%	tidak efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996.

Keterangan:

REKD : Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

RPPAD : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

TPPAD : Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3. Rasio pertumbuhan keuangan daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah itu sendiri untuk membiayai pengeluaran pemerintahan beserta pelaksanaan modal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi daerah yang mampu menghasilkan pendapatan daerah baik melalui melalui pendapatan asli daerah maupun dana

bagi hasil, Rumus Rasio pertumbuhan keuangan daerah sebagai berikut:

a.

Keterangan:

PPAD : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Tahun Peristiwa

Pendapatan Asli Daerah Tahun Sebelum Peristiwa

b.

Keterangan:

PTP : Pertumbuhan Total Pendapatan

Pendapatan Tahun Peristiwa

Pendapatan Tahun Sebelum Peristiwa

c.

Keterangan:

PBO : Pertumbuhan Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Peristiwa

Belanja Operasi Tahun Sebelum Peristiwa

d.

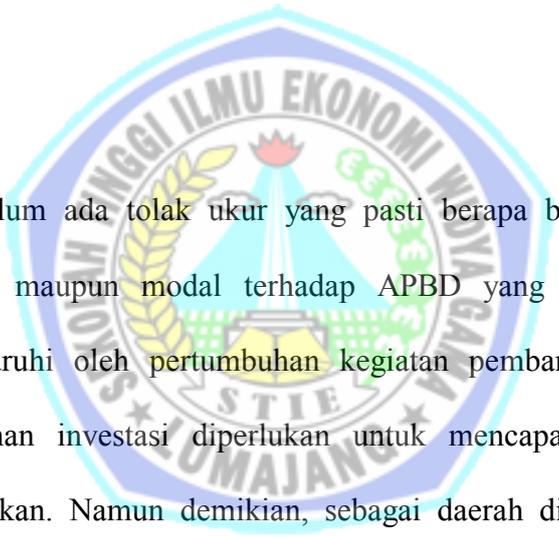
Keterangan:

PBM : Pertumbuhan Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Peristiwa

Belanja Modal Tahun Sebelum Peristiwa

4. Rasio aktivitas ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio aktivitas itu dapat dirumuskan sebagai berikut:



Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang, peranan Pemerintah Daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Keterangan:

RBO : Rasio Belanja Operasi

TBO : Total Belanja Operasi

TAPBD : Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RBM : Rasio Belanja Modal

TBM : Total Belanja Modal

#### Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio derajat otonomi fiskal perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah, untuk melihat seberapa kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan dengan potensi daerah yang dimiliki daerah tersebut.

Rumus rasio derajat otonomi fiskal yaitu :

Nilai	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Cukup
20% - 30%	Sedang
10% - 20%	Kurang
0% - 10%	sangat kurang

Keterangan:

DOF: Derajat Otonomi Fiskal

PAD: Pendapatan Asli Daerah

TPD: Total Pendapatab Daerah



